

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI DKI JAKARTA

No	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	DATA LPPD 2017		KETERANGAN							
								Elemen Data	Capaian Kinerja								
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	...Kab/kota ...Kab/kota	ada	ada	DINAS CITATA							
		Peraturan ttg Kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD	...Kab/kota ...Kab/kota	1,00 1,00		100%	DINAS KEPENDUDUKAN						
		Aparat satpol PP	3	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2017 dibagi jumlah penduduk kali 50.000	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2017 Penduduk pada akhir tahun 2017	orang Jiwa	3.232 10.348.570	15,62	SATPOL PP DINAS KEPENDUDUKAN							
		KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	4 5.a 5.b	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006 Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian LPPD 2017 (tanggal/bulan/tahun) Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2017 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun) Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2017 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian Tgl penyampaian Tgl penyampaian	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	tepat tepat tepat	BIRO TAPEM						
Implementasi SPM	6										Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD	Total Urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota	... Urusan	15,00	15,00	BIRO ORB
													Kab/kota xxx Urusan, Kab/kota xxx Urusan, Kab/kota xxx Urusan, Kab/kota xxxUrusan, dst	Sebutkan jumlah urusan yg sudah diterapkan SPM dri masing-masing Kab/kota			
			Kerjasama antar daerah Kab/kota	7	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2017)	Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD	... Kab/kota	1	1			BIRO TAPEM				
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah						27	27									
1. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2017 1. MOU No. 3349/-072.26 dan No 120.23/1/4.1.3.1/2017 dengan Pemprov Bangka Barat ttg pembibitan dan penggemukan ternak sapi utk penyediaan daging sapi	No&tgl MOU																
2. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2017 2. MOU No. 18 Tahun 2012 ; No. 10/KB KSD/KT6/2012; dan No. 475.1/72/DISTRAN.2012 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemkab Kapuas ttg Penyelenggaraan Transmigrasi	MoU																
3. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2017 3. Mou No. 19 Tahun 2012 ; No. 37 Tahun 2012; dan No. 475.1/2136 dengan Pemprov Sultra Pemkab Muna ttg Penyelenggaraan Transmigrasi	MoU																
4. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2017 4. Mou No. 57761/-1.896 dan No.180/20/415.4/2012 dengan Pemkab Kapahiang ttg Penyelenggaraan Transmigrasi	MoU																

No	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	DATA LPPD 2017		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
3	KESELARASAN ANTARA KEBUJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas	Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan	11 11	100,00	BAPEDDA
		Kewenangan	9	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota dibagi jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota Jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan	% Kab/kota	26,00 1,00	26,00 1,00	
		Keuangan	10	Waktu penetapan perda APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2017	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2017 : Perda 6 th 2016 ttg APBD DKI Jakarta Tahun 2017 30/12/2016	tgl penetapan	Perda 6 th 2016	tepat	BPKD
			11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada/tidak	ada	ada	
			12	belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan PU 5. Urusan Sosial 6. Urusan Tenaga Kerja 7. Urusan Koperasi 8. Urusan Satpol PP 9. Urusan Kependudukan & Capil Total Belanja APBD	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	39.691.869.998.653 18.208.285.167.195 9.140.773.471.022 1.825.067.782.879 8.323.011.475.933 548.918.145.663 268.875.112.588 201.000.724.161 907.835.830.418 268.102.288.794 61.821.923.000.480	64,20%	
			13	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100 %	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan	Rp Rp	27.349.058.638.217 18.208.285.167.195 9.140.773.471.022	44,24%	
		Pelayanan publik	14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak	ada	ada	BIRO HUKUM/PTSP
		Kepegawaian	15	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi Jumlah Penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2017 Penduduk pada akhir tahun 2017	orang Jiwa	69.540 10.348.570	0,67%	BKD DINAS KEPENDUDUKAN
			16	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	ada atau tidak adanya data base kepegawaian	1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1 2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #2 3. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #3 4. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #4 5. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #5	Sistem Sistem Sistem Informasi Web Dok ASN Sistem Informasi Website BKD	 	ada	BKD
			17	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 18/2016 dan Permendagri 97/2016	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 18/2016 dan Permendagri 97/2016	Jumlah SKPD 1. Biro (setda) 2. Dinas 3. Badan 4. Kantor 5. Rumah Sakit 6. Lembaga Teknis lainnya 7. Kabupaten/kota	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	42 1 22 10 - 3 6	42 1 22 10 - 3 6	
										BIRO ORB

No	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	DATA LPPD 2017		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Jumlah perda tahun 2015	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda	6	6	BIRO HUKUM
						1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2017 #1	No&tgl perda	Perda Nomor 1 Tahun 2017		
						2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2017 #2	No&tgl perda	Perda Nomor 2 Tahun 2017		
						3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2017#3	No&tgl perda	Perda Nomor 3 Tahun 2017		
						4. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2017 #4	No&tgl perda	Perda Nomor 4 Tahun 2017		
						5. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2017 #5	No&tgl perda	Perda Nomor 5 Tahun 2017		
						6. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2017 #6	No&tgl perda	Perda Nomor 6 Tahun 2017		
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017 RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	Raperda Raperda	6,00 32	19%	BIRO HUKUM & SET. DPRD
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Keputusan DPRD tahun 2017 yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dibagi jumlah Keputusan DPRD tahun 2017 x 100%	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2017 Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan tahun 2017	Keputusan Keputusan	82 82	100%	SET. DPRD
					Jumlah keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Gubernur dalam tahun 2017 x 100%	Keputusan Gubernur tahun 2017 yang ditindaklanjuti Keputusan Gubernur tahun 2017	Kep Kep	2.362 2.362	100%	BIRO UMUM
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	tindaklanjuti keputusan KDH	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah peraturan Gubernur dalam tahun 2017 x 100%	Peraturan Gubernur tahun 2017 yang ditindaklanjuti Peraturan Gubernur tahun 2017 yang ditindaklanjuti	PerBup PerBup	201 201	100%	
		tindaklanjuti Peraturan KDH	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	PERDA yang dibatalkan PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	Perda Perda	0,00 6	0,00	BIRO HUKUM
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang konsultasi publik	24	Keberadaan PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA / PerGub	ada/tidak ada PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak	ada	ada	SET.DPRD/BIRO HUKUM/BAPPEDA, Perda 14 th 2011 ttg Perencanaan Penganggaran Terpadu
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Provinsi, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerGub	1. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1	Media informasi	JDIH.Jakarta.go.id	ada	DISKOMINFOTIK
						2. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2	Media informasi	Beritajakarta.id		
						3. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3	Media informasi	Smartcity.jakarta.go.id		
						4. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #4	Media informasi	jakarta.go.id		
5. Media Informasi yang dapat diakses oleh Publik #5	Media informasi	Pelayanan.jakarta.go.id								

No	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	DATA LPPD 2017		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK, DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017	Rp	18.969.291.389.929	101,46%	BPKD
						Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2017	Rp	18.696.340.600.000		
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Belanja Langsung (Realisasi) DAU Tahun 2017	Rp	27.305.210.224.908	27.305.210.224.908	
							Rp	0		
		Alokasi belanja pada APBD	28	Belanja Publik terhadap total APBD	Total Belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Total Belanja langsung tahun 2017 (realisasi)	Rp	27.305.210.224.908	53,49%	
				Total Belanja APBD tahun 2017 (realisasi)	Rp	51.043.030.955.776				
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp	43.211.576.966.867	67,38%	
								Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Lapkeu	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk 2 tahun terakhir	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017	WTP, WDP, TMP, TW	-	-	INSPEKTORAT
						Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016	WTP, WDP, TMP, TW	WDP	WDP	
		Besaran SILPA	31	SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	SILPA Tahun 2017	Rp	12.497.577.878.386	19,49%	BPKD
		Realisasi PAD	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD tahun 2017 dibagi anggaran pendapatan dalam APBD 2017 x 100%	Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp	64.134.650.084.341		
		Realisasi belanja	33	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	Realisasi PAD Tahun 2017	Rp	43.211.576.966.867	69,12%	
						Anggaran Pendapatan dalam APBD 2017	Rp	62.517.744.026.535		
		Pengawasan Inspektorat Daerah	34	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	Realisasi Belanja Tahun 2017	Rp	51.043.030.955.776	82,56%	
						Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2017	Rp	61.821.923.000.480		
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2017	Temuan	6.081,00	70,04%	INSPEKTORAT (data yang digunakan rekomendasi)
						Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2017	Temuan	8.682,00		
		Peningkatan PAD	36	Peningkatan PAD	(PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 x 100%	Realisasi PAD Tahun 2017	Rp	43.211.576.966.867	75,31%	
						Potensi PAD Pada tahun 2017	Rp	57.376.730.000.000		
						Total PAD pada tahun 2017	Rp	6.323.559.379.151		
		Total PAD pada tahun 2016	Rp	36.888.017.587.716						
13	TEROBOSAN INOVASI BARU	Penghargaan	37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Penghargaan	167	167	SEMUA SKPD/UKPD YANG MENERIMA PENGHARGAAN DARI PEM. PUSAT BAIK KEMENTERIAN MAUPUN LPNK TH 2017
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada E-Procurement	ada/tidak ada PERDA tentang E-Procurement	Ada/tidak	ada	ada	BIRO HUKUM
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin Investasi dalam tahun 2016	Persetujuan ijin Investasi pada Tahun 2017	Izin	629	629	DINAS PTSP